

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KETENAGAKERJAAN MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
TUNGGAKAN PEMBAYARAN IURAN BPJS SEBAGAI UPAYA
PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN**

SUJONO

NRP ;124122503

Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Penegakan hukum dalam bidang ketenagakerjaan tidak hanya mencakup perlindungan terhadap hak normatif pekerja, tetapi termasuk juga kepesertaan dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan tersebut diawasi oleh internal BPJS Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan yang berada dalam instansi pemerintah yang berwenang yaitu PPNS Ketenagakerjaan. Praktiknya proses penyelesaian terhadap tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan melibatkan banyak instansi yang terlibat, yaitu internal BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan, PPNS Ketenagakerjaan dan Penyidik Kepolisian. Banyaknya instansi yang terlibat dalam proses penyelesaiannya menjadi problematik sendiri bagi PPNS Ketenagakerjaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ketenagakerjaan khususnya tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji pertama, bagaimana mekanisme pembayaran dan proses penyelesaian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, bagaimana konstruksi hukum kedudukan dan peran PPNS Ketenagakerjaan dalam menangani tindak pidana tunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta penulisan tesis ini menggunakan teknik analisis hukum berdasarkan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta memungut dan menyetorkan iuran ke BPJS dan proses penyelesaian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan diawali dengan sanksi administratif, apabila tidak dilaksanakan maka berlanjut pada sanksi pidana. Konstruksi hukum kewenangan PPNS Ketenagakerjaan dalam menangani tindak pidana tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan tidak secara spesifik diatur dalam UU BPJS, namun dalam Pasal 19 jo Pasal 55 UU BPJS membuka ruang PPNS Ketenagakerjaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. Hal itu berdasarkan pada Pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHP, Pasal 182 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Ketenagakerjaan dan PP No 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Namun, masih menghadapi kendala kelembagaan, koordinasi antar sektor, keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran PPNS Ketenagakerjaan agar dapat berjalan optimal dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

Kata kunci: BPJS, ketenagakerjaan, penyidikan, PPNS, tindak pidana, iuran

**THE AUTHORITY OF CIVIL SERVANT INVESTIGATORS IN LABOR
TO CONDUCT INVESTIGATIONS OF CRIMES OF DELAYED BPJS
CONTRIBUTION PAYMENTS AS AN EFFORT IN LAW
ENFORCEMENT IN THE LABOR SECTOR**

SUJONO

Master of Law

Supervisor: Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum

ABSTRACT

Law enforcement in the labor sector encompasses not only the protection of workers' normative rights but also the participation and payment of BPJS employment contributions. The implementation is supervised by the internal BPJS employment and the Labor Supervisors within the relevant government agencies, namely the Civil Servant Investigators of Labor. In practice, the process of resolving delayed BPJS employment contributions involves many agencies, including the internal BPJS employment. The Prosecutor's Office, Civil Servant Investigators of Labor, and the Police Investigators. The multitude of agencies involved in the resolution process presents its own challenges for Civil Servant Investigators of Labor in conducting investigations into labor crimes, particularly concerning delayed BPJS employment contributions. This thesis aims to examine, first, the mechanisms of payment and the resolution process for delayed BPJS employment contributions. Secondly, it seeks to analyze the legal framework regarding the position and role of Civil Servant Investigators of Labor in handling crimes related to delayed BPJS employment payments. The research method employed is a normative legal study, utilizing a statutory and conceptual approach, with legal analysis based on literature review. The research findings indicate that employers are obliged to register themselves and their employees as participants of BPJS employment and to collect and remit contributions to BPJS. The resolution process for delayed BPJS employment contributions begins with administrative sanctions, and if not complied with, progresses to criminal sanctions. The legal framework for the authority of Civil Servant Investigators of Labor in addressing crimes related to delayed BPJS employment contributions is not explicitly regulated in the BPJS Law; however, Article 19 in conjunction with Article 55 of the BPJS Law opens the space for Civil Servant Investigators of Labor to conduct investigations into labor crimes. This is based on Article 6 Paragraph (1) letter b of the Criminal Procedure Code (KUHAP), Article 182 Paragraphs (1) and (2) of the Labor Law, and Government Regulation No. 43 of 2012 concerning Procedures for Coordination, Supervision, and Technical Guidance for Special Police, Civil Servant Investigators, and Forms of Self-Security. However, they still face institutional challenges, inter-sector coordination, and limited resources. Therefore, strengthening the role of Civil Servant Investigators of Labor is essential for optimal functioning and to provide a deterrent effect for violators.

Keywords: BPJS, labor, investigation, PPNS, crimes, contributions